

45 TAHUN AKPOL STRIVING FOR EXCELLENCE

Tahun 2007 silam, Akpol memprioritaskan rekrutmen sarjana strata satu (S1) untuk calon tarunanya. Sementara lulusan SLTA yang direkrut Akpol turun drastis menjadi hanya 70 orang dan di tahun 2008, Akpol bahkan tidak lagi menerima lulusan SLTA. Hal penting lainnya, pada tahun 2007 pula Akpol memberi kesempatan yang lebih besar kepada kaum perempuan untuk ikut bergabung. Jumlahnya mencapai 70 taruni -- 50 di antaranya lulusan S1 dan 20 sisanya lulusan SLTA. Jadi, bisa dikatakan mulai tahun 2007 ini Akpol mencoba menorehkan sejarah baru. Sebuah sejarah untuk mengantisipasi perkembangan dinamika masyarakat yang semakin menuntut sikap transparansi dan demokratisasi di berbagai bidang.

TEROBOSAN progresif yang dilakukan Polri dengan rekrutmen calon taruna Akpol dari lulusan sarjana bisa dibilang merupakan hal yang paling mencuat dan banyak menuai pujian saat itu. Optimisme muncul tak hanya di internal korps Polri tapi juga di masyarakat, bahwa terobosan tersebut mencuatkan harapan bakal hadirnya kader-kader Polri yang berwatak santun (civil police); melayani dan mengayomi masyarakat. Dengan kata lain, paradigma Polri sebagai pengayom masyarakat bisa dilakukan dengan baik oleh lulusan Akpol di masa depan. Dengan kata lain, pendidikan perwira Polri yang berasal dari sarjana ini memang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak kepribadian polisi yang bermartabat lewat sosok perwira Polri yang mahir, terpuji, dan patuh hukum untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Polri.

Lalu, apa yang sudah dihasilkan AKPOL setelah tiga tahun menjalankan terobosan barunya? Mengagetkan, karena masyarakat dihadapkan pada kenyataan langkah Polri yang kembali mengubah kebijakan rekrutmen calon taruna (catar) Akpol. Mulai tahun ini rekrutmen catar justru kembali



mensyaratkan lulusan SMU/SLTA dan tak lagi menerima lulusan sarjana S1 (dan S2) yang digadang-gadang sebagai langkah reformasi di tubuh Akpol sejak 2007. Itu artinya program rekrutmen catar lulusan S1 dan S2 hanya berjalan 2 tahun.

Tahun 2010 ini, Akpol dipastikan tak akan menerima lagi taruna dari jenjang sarjana baik S1 maupun S2. "Mulai tahun akademik 2010, Akpol hanya akan menerima lulusan dari SMA saja dengan lama studi empat tahun. Jadi lulus sudah S1. Selanjutnya

kalau mengambil PTIK maka langsung mengambil program S2," ungkap Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri usai memimpin upacara penutupan Pendidikan Taruna Akpol di Semarang, Desember tahun silam (2009).

Alasannya? Nah, ini yang kemudian menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat. Pasalnya, dengan alasan yang sama ketika Polri berkomitmen melakukan reformasi birokrasi dengan merekrut catar sarjana di Akpol mulai 2007, Polri justru seperti mengambil langkah mundur dengan kembali ke "cara lama" rekrutmen catar Akpol lulusan SMU/SLTA. "Langkah itu adalah salah satu upaya guna mewujudkan reformasi birokrasi di internal Polri. Target kita pada 2010 memang membenahi sumber daya manusia. Ada perubahan mendasar di aspek pendidikan, dan SDM yang paling mutlak untuk mengubah kultur Polri. Jadi, basic-nya dulu kita ubah," ujar Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Kapolri saat itu.

Kapolri (saat itu), Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengakui bahwa dari pengalaman lalu, pendidikan dari jenjang SMA dan sarjana ternyata tak bisa disatukan. Dan, lanjutnya, inilah yang melatarbelakangi kebijakan

baru tak ada lagi taruna Akpol dari rekrutmen S1 mulai tahun 2010 ini. Namun Kapolri menyatakan, masih terbuka peluang bagi sarjana yang ingin menjadi polisi yaitu dengan pendidikan Perwira Polri Sumber Sarjana (PPSS).

Faktanya, jumlah taruna Akpol dari jenjang S1 yang mulai diberlakukan sejak 2007 memang terlihat terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Akpol mulai menerima taruna dari jenjang sarjana mulai tahun 2007, dan pada tahun itu Akpol menerima taruna dari rekrutmen sarjana sebanyak 211, sementara dari SMU tercatat hanya 79 orang. Selanjutnya pada 2008, taruna rekrutmen dari jenjang sarjana meningkat jadi 314 orang. Terakhir pada 2009, taruna dari S1 anjlok drastis menjadi hanya 72 orang dan lulusan SMU justru melesit jadi 327 orang. Selama pendidikan, rekrutmen dari lulusan sarjana dan SMU memang ada perbedaan mendasar. Lulusan S1 mengikuti masa pendidikan selama dua tahun enam bulan dan dari SMU menjalani tiga tahun enam bulan.

Langkah mundur? Yang pasti, menurut Kapolri BHD saat itu, tak hanya pendidikan di Akpol saja yang diubah, tetapi semua elemen pun mengalami perubahan. Kapolri menjelaskan, mulai 2010 ini pendidikan Bintara dan Sepaca pun akan diubah. Masa pendidikan yang selama ini berlangsung empat bulan akan menjadi tujuh bulan. Begitu pula dengan PTIK dan Sepati, yang semula dalam satu tahun bisa dua kali diselenggarakan, cukup sekali saja dalam setahun. "Ke depan, bobot dan kualitas yang ditingkatkan, bukan jumlahnya. Perbaikan ke dalam akan terus dilakukan," paparnya.

Pengamat dan Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, jauh-jauh hari memang telah

mempertanyakan apakah 'eksperimen Akpol' (yang mensyaratkan penerimaan dari lulusan S1) akan berlangsung ajeg dan permanen. "Waktu itu kan saya mengkhawatirkan kebijakan yang belum paripurna tersebut hanya berjalan pada era Kapolri Soetanto saja (lihat Jagratara edisi Desember 2007). Ternyata, tidak perlu menunggu lama, pada tahun 2010 ini pertanyaan itu telah terjawab. Eksperimen tersebut secara tidak langsung dinyatakan gagal," ungkapnya.

Jika Adrianus lebih suka menyebut 'eksperimen Akpol', itu lebih karena kebijakan lulusan sarjana sebagai persyaratan masuk Akpol itu sejak awal lebih kuat dari sisi 'niat' namun memiliki beberapa kelemahan dalam perencanaannya. Walau dikategorikan sebagai lembaga pendidikan tingkat diploma, tapi peserta didiknya adalah sarjana (bahkan magister pun ada). Cara berpikir di balik kebijakan itu, menurut Adrianus, sebenarnya logis juga. Disinyalir, perwira lulusan Akpol masih terlalu belia untuk menjadi pimpinan unit. Dengan usia yang masih 20 tahunan awal, dan dengan pengalaman kerja amat minim, maka kepemimpinan lapangannya amat diragukan. Akibatnya, perwira belia ini mudah dikerjai anak buah (yang memang lebih berpengalaman) atau bisa juga menjalankan kepemimpinan yang kompromistis saja. Nah, dengan menghasilkan perwira yang berusia lebih tua, sudah sarjana pula, maka diharapkan kematangan kepribadian plus pengetahuan akan tercapai dengan sendirinya.

"Ada beberapa kelemahan yang ditemui sejak awal perencanaannya. Pertama, kebijakan itu dibuat bukan berdasarkan hasil evaluasi yang memadai, tapi tampaknya lebih dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari saja. Kedua, walaupun pengalaman itu benar, maka kebijakan yang diambil sebenarnya tidak harus men-sarjana-kan taruna Akpol. Jadi, ada unsur preferensi di sini. Akibatnya, dalam rangka membenarkan preferensi itu, banyak hal kemudian ditabrak," ungkapnya.

Masih menurut Adrianus, sebetulnya sangat tidak ideal



menampung peserta didik yang beragam -- ada yang lulusan SLTA/SMU dan ada yang sarjana -- dalam suatu lembaga didik dengan kurikulum dan pengajar yang sama. Pembedanya hanya satu: lama masa didik.

"Hal itu bukannya tidak disadari oleh berbagai kalangan di dalam Polri saat itu, cuma nampaknya tidak ada yang berani membantah kemauan Kapolri Soetanto. Jadi, ini benar-benar suatu eksperimen. Saat kepemimpinan Polri berganti, saya mendengar telah ada upaya "menggoyang" eksperimen tersebut. Konon sebelumnya telah dilakukan survei saat era Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang hasilnya kurang lebih, relatif lebih rendahnya kinerja akademik taruna sarjana ketimbang taruna lulusan SLTA/SMU. Lalu, karena sudah sarjana, para taruna bergelar akademik itu relatif sulit dibentuk kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang sengaja ditumbuhkan dalam Polri," papar kriminolog dari UI itu.

Ada lagi faktor yang dulu dianggap nilai plus, sekarang malah dianggap minus. Faktor itu adalah usia pakai. Menurut Adrianus, jalan pemikiran Kapolri Soetanto adalah menghargai para taruna sarjana dengan "tabungan" masa dinas yang lebih banyak, yang memungkinkannya naik pangkat lebih cepat dari taruna SLTA/SMU. Belakangan, hal itu dianggap sebagai faktor negatif, karena berpotensi menimbulkan



kecemburuan pada sesama taruna lain namun berasal dari SLTA/SMU. "Saya melihat, pimpinan Polri dewasa ini cukup sincere atau tulus mengadakan perubahan ini semata-mata melihat bahwa situasi akan lebih detrimental (menuju ke arah pemburukan) jika dipertahankan terus. Walau berpotensi dikedam masyarakat sebagai organisasi yang tidak konsisten, tampaknya pil pahit itu memang harus ditelan," tandas Adrianus.

TRANSPARAN

Namun di luar itu, Kriminolog UI Adrianus Meliala menilai bagaimanapun Polri perlu memberi penjelasan transparan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan kembali pola rekrutmen Akpol ke lulusan SLTA/SMU. "Ini perlu dilakukan untuk mengangkat citra yang pasti menurun, karena dianggap 'plin-plan' dan impulsif (mengikuti kata hati pimpinan) dalam membuat kebijakan," ungkapnya.

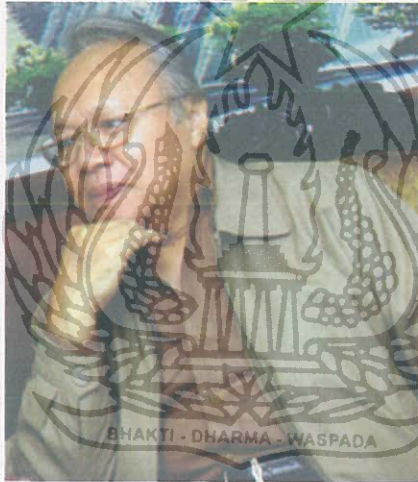
Yang perlu dilakukan, lanjut Adrianus, adalah Polri perlu launching satu paket kebijakan guna disosialisasikan ke masyarakat. Paket tersebut, pertama, bahwa rekrutmen sumber SLTA/SMU adalah untuk kebaikan masyarakat dan Polri sendiri, bukan untuk kepentingan beberapa pihak yang ingin anaknya masuk Akpol. Sosialisasi ini penting untuk menepis keraguan masyarakat tentang latar belakang kebijakan baru tersebut. Bagi para sarjana dan magister, sebaiknya juga tetap tersedia kesempatan untuk masuk Polri, yakni melalui jalur PPSS (Program Pendidikan Sumber Sarjana). Kuotanya pun besar. Hal ini penting dikemukakan agar tidak menutup harapan anggota masyarakat yang tetap ingin dirinya atau putranya menjadi anggota Polri.

Kedua, setelah diterima, taruna dari sekolah menengah tersebut akan lebih lama berada dalam pendidikan guna mencapai gelar sarjana kepolian, dan tidak lagi hanya berkualifikasi D3. Terkait ini, agar konsisten, sebutan 'akademi' bagi Akpol memang tidak bisa dipertahankan. Implikasi lainnya, jika Akpol kemudian menjadi sekolah tinggi bagi ilmu kepolisian, lalu STIK PTIK yang ada di Jakarta mau diapakan?

Ketiga, sejalan dengan pertanyaan soal STIK PTIK, maka perlu diinformasikan kepada masyarakat perihal reformasi menyeluruh terkait sistem pendidikan Polri (berikut lembaga-lembaga pendidikannya). Sebelum restrukturisasi yang

terakhir ini, maka struktur lemdik Polri memang cukup memusingkan perihal mengapa lemdik A berada dibawah B dan tidak dibawah C, demikian pula bedanya lemdik A dibanding lemdik B dan seterusnya. Beruntung sekarang terdapat lembaga Lemdikpol yang menaungi seluruh lembaga pendidikan Polri, mulai tingkat SPN hingga Sespati, sehingga memungkinkan integrasi yang menyeluruh mulai dari kurikulum hingga pelaksanaan pendidikan.

Keempat, terkait dengan integrasi semua lemdik di bawah Lemdikpol, maka perlu diinformasikan juga bahwa terdapat kesempatan yang lebih besar bagi taruna Akpol untuk menggunakan sarana pendidikan yang "wah" milik JCLEC (Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation). "Selama ini, keberadaan JCLEC masih seperti enclave yang terasing dari komunitas Akpol itu sendiri," tandas Adrianus.



BUKAN LANGKAH MUNDUR

Berbeda dengan Adrianus, pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit justru melihat rekrutmen calon taruna atau perwira yang kembali mensyaratkan lulusan SMU/SLTA jelas merupakan suatu langkah mundur dan sangat disayangkan. Seharusnya, menurut dia, untuk saat ini dan saat mendatang persyaratan untuk menjadi seorang polisi -- apalagi untuk menjadi taruna atau perwira -- sebaiknya memang dari lulusan S1 (sarjana) atau minimal sarjana muda (D3). "Ini karena masalah yang harus ditangani polisi setelah diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat sangat luas dan kompleks. Apabila pendidikan seorang anggota polisi hanya berbasis lulusan SMU/SLTA jelas tidak cukup dan memadai.

Ini bukan berarti kita meremehkan lulusan SMU/SLTA. Tapi fakta dan kenyataannya di lapangan memang seperti itu," paparnya.

Menurut Arbi Sanit, sebenarnya rekrutmen sarjana strata 1 (sarjana) untuk calon taruna yang sudah dilakukan sejak 2007 sudah bagus. Jadi kalau sekarang malah dikembalikan ke pola lama, yaitu rekrutmen untuk calon taruna hanya dari lulusan SMU/SLTA, ini yang harus dikaji. Hasil kajiannya alangkah eloknya kalau disampaikan Polri kepada masyarakat luas secara transparan. Bagaimanapun, lanjutnya, di masa mendatang kasus yang akan dihadapi kepolisian jelas akan semakin luas, rumit dan kompleks.

"Untuk menangani itu semua diperlukan polisi yang cerdas, santun, tahu apa itu demokrasi, memahami hal yang ada kaitannya dengan HAM (Hak Asasi Manusia) dan yang memiliki pengetahuan yang luas. Persyaratan tersebut akan sulit apabila polisi kita, terutama taruna atau perwiranya, hanya direkrut dari lulusan SMU/SLTA."

Arbi Sanit juga mengharapkan di masa mendatang dalam menghadapi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, LSM, masyarakat dan buruh, polisi harus bertindak cerdas, tidak kasar atau brutal serta tidak simpatik. Ini tidak bisa dilakukan apabila polisi yang menghadapi para demonstrans tersebut hanya lulusan SMU/SLTA. Namun ia mengingatkan agar gaji polisi harus cukup dan layak untuk memenuhi kebutuhan minimum keluarganya. "Kalau sekarang gaji polisi rata-rata hanya cukup untuk hidup satu minggu, sangat sulit kita punya polisi yang bermoral baik. Kita juga harus realistis," tegas Arbi Sanit.

Tapi pakar hukum Prof Dr Dimiyati Hartono justru menilai pengembalian rekrutmen calon taruna Akpol dari lulusan S1 ke SMU/SLTA sangat



tepat. "Ini sama sekali bukan langkah mundur. Penerimaan siswa pada sebuah akademi itu, lazimnya memang harus dari lulusan SMU/SLTA. Kalau pada tahun 2007 Akpol menerima siswa dari lulusan S1, tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kualitas polisi. Ketika kualitas polisi itu ditingkatkan dengan cara penerimaan Akpol dengan syarat S1, sebenarnya tidak tepat. Karena, seseorang yang sudah mendapat pendidikan S1 dan pendidikan SMU/SLTA dari segi knowledge itu jauh berbeda. Dari segi untuk melakukan tugas juga jauh berbeda," ujarnya.

Mungkin, kata Dimiyati, pemikiran pendeknya melihat kualitas pendidikan yang lebih tinggi akan menghasilkan polisi yang lebih baik. Tapi kita lupa satu hal, apapun namanya Akpol itu merupakan pendidikan khusus, bukan pendidikan umum. Pendidikan S1 itu, apa pun fakultasnya, sifatnya umum. Di universitas siswa diberi pendidikan pada tataran yang sifatnya umum. Nanti dalam praktik memilih sendiri kekhususannya. Tapi kalau di akademi kepolisian, yang diberikan atau diutamakan sebenarnya penguasaan bidang hukum, terutama hukum pidana.

Ketika polisi menghadapi persoalan, lanjut Dimiyati, yang dibutuhkan adalah pengetahuan terhadap undang-undang. Hal itu dapat dikerjakan oleh seorang polisi yang mendapat pendidikan dasar polisi yang baik. Orang yang keluar dari SMA, katakanlah dari segi pendidikan hukumnya kosong, sehingga ketika ia mendapat pendidikan polisi, dia baru pertama kali masuk bidang pendidikan pengetahuan hukum yang langsung kepada praktek, yaitu hukum pidana. Disitulah dia ditempa di bidang keahliannya, terutama di bidang acara pidana. Sebab, tugas polisi lebih banyak pada acara pidana. Setelah itu baru menyusul dalam materi pidananya. Secara khusus kemudian ditingkatkan kegiatan penyelidikan, kegiatan penyidikan yang semuanya terkait hanya dengan hukum pidana.

Dengan demikian, kalau sebelumnya yang bersangkutan keluar dari SMA tanpa basis pendidikan hukum, maka dia akan lebih konsentrasi ke situ, tidak terlalu banyak pertimbangannya. Tapi kalau dia lulusan sarjana, dia tentu punya gambaran atau wawasan yang jauh lebih luas pada saat dia menerima pendidikan polisi. Di situ ada kontroversi pada diri orang tersebut. Dia akan mengkaji ilmu yang diberikan di Akpol dan materi yang diterima di perguruan tinggi dimana ia

belajar. Itulah kesalahan utama Akpol ketika merekrut lulusan S1 sebagai calon taruna.

"Jadi kembalinya Akpol menerima calon taruna dari lulusan SMU/SLTA bukan S1 bukan suatu langkah mundur, tapi justru merupakan langkah yang tepat," ujar Dimiyati, sembari menambahkan, "Di manapun yang namanya akademi itu pasti menerima siswa dari lulusan SMU/SLTA, bukan dari S1. Kalau menerima lulusan S1 namanya bukan akademi lagi."

Dimiyati tidak sependapat dengan penilaian bahwa perubahan pola rekrutmen calon taruna Akpol dari lulusan S1 ke SMU/SLTA lagi menunjukkan Polri tidak sungguh-sungguh melakukan reformasi. Menurutnya, komitmen reformasi Polri tidak terletak pada pola rekrutmen calon taruna Akpol, melainkan pada bagaimana kepolisian menegakkan hukum. Tapi sekarang hasilnya dapat dilihat, sejak 2007 Akpol sudah menerima calon taruna dari lulusan S1, penegakkan hukum yang dilakukan kepolisian tetap tidak karuan.

"Coba lihatlah kasus Gayus HP Tambunan. Itu sama sekali tidak menggambarkan profesionalisme atau reformasi di tubuh kepolisian. Oleh karena itu, di samping permasalahannya teknis hukum pidana yang terkait penyelidikan, penyidikan dan pembuatan berita acara, hal yang penting adalah disiplin dan penanaman moral dari polisi itu sendiri. Polisi perlu latihan dan fisik yang kuat, tapi porsinya jangan diperbesar pada latihan fisiknya. Tapi diperbesar pada kemampuan teknis

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



penguasaan terhadap hukum pidana," paparnya.

Menjawab pertanyaan apakah kurikulum Akpol gagal menyatukan taruna lulusan S1 dengan lulusan SMU/SLTA, Dimiyati menegaskan itu sudah jelas. Karena, taruna yang keluaran S1 dari awal merasa memiliki kelebihan bahwa dia sudah sarjana. Ia juga menilai fisik kurikulum Akpol tidak perlu diubah dalam tempo yang pendek. Tapi kalau ada sasaran yang ingin dicapai dan untuk itu perlu mengubah kurikulum, silakan kurikulum itu diubah.

"Ada baiknya Polri perlu melakukan studi banding ke Inggris. Kurikulum pendidikan calon polisi Inggris, pada jam-jam tertentu siswa dilepaskan di lapangan untuk ikut baris-berbaris. Tapi kelompok per kelompok diberi kasus. Kemudian kasus itu dibahas bersama dalam kelompok itu, dimana kelebihannya, dimana kekurangannya, dimana kesalahannya, dan dimana keberhasilannya, lalu dipresentasikan kelompok itu di dalam kelas. Program seperti ini kelihatannya tidak ada pada kurikulum Akpol kita," ungkap Dimiyati.

Hal senada juga dikatakan pengamat politik dari ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Dr Marwah Daud Ibrahim. Menurut Marwah, rekrutmen calon taruna Akpol itu dari lulusan S1 atau SMU/SLTA sangat tergantung dari kebutuhan atau sasaran yang akan dicapai. Kalau yang akan dicapai adalah kedalaman, ada betulnya kalau calon taruna Akpol dari lulusan SMU/SLTA. Dengan demikian, sejak lulus SMU/SLTA langsung dididik dengan intensif tentang ilmu kepolisian.

Marwah berpendapat pengembalian rekrutmen calon taruna Akpol dari lulusan S1 ke SMU/SLTA lagi tentunya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak oleh kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga yang besar dan sudah berpengalaman luas, tentunya tidak gegabah dalam mengambil keputusan. "Tentu banyak ahli pendidikan di dalam tubuh Polri, sehingga keputusan apapun yang diambil sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek. "Rekrutmen calon perwira Akademi Militer kan juga diambil dari lulusan SMU atau SLTA, bukan dari S1. Mungkin dinilai pembentukan fisik dan karakternya lebih kuat dan matang kalau diambil dari lulusan SMU atau SLTA," ujar Marwah.

Yang penting, kata Marwah, penerimaan calon taruna Akpol itu sudah bisa transparan dan bebas

KKN. Agar lebih transparan dan benar-benar bebas KKN, lanjutnya, dalam merekrut calon taruna Akpol Polri perlu menggandeng lembaga independent, misalnya Universitas Negeri yang terkemuka seperti UI, ITB, UGM atau Unair. Hal itu sudah dilakukan perusahaan besar seperti Pertamina dan PLN. Tes awal atau tes akademisnya, biarlah dilakukan lembaga independen atau perguruan tinggi negeri terkemuka tersebut. Dalam tes akademis itu sebaiknya Polri tak ikut campur. Polri hanya memproses siswa-siswa yang dinyatakan lulus oleh lembaga independen atau perguruan tinggi terkemuka itu. Tes fisik tentunya dilakukan Polri. Tapi tes fisik itu dilakukan setelah siswa dinyatakan lulus tes akademis. "Untuk transparansi, rekrutment harus diumumkan melalui internet dan media baik cetak maupun elektronik. Demikian pula proses dan hasil seleksinya rekrutmentnya," tandas Marwah.

MENGETAK PRAKTISI AKADEMISI

Lalu, apa kata Akpol sendiri? Nah, Gubernur Akpol, Irjen Boedi Santosa tentu punya jawaban. Menurutnya, hasil kajian dan kebijakan pimpinan selama ini memberikan semacam alasan bahwa rekrutmen dari sarjana itu masa dinas akan lebih pendek. "Mereka masuk umur sudah 27 tahun, maka pensiunnya pada umur 58 tahun, usia dimana sedang matang-matangnya kok malah pensiun. Untuk itu, guna menghadapi masa depan, maka dibuat kebijakan merekrut kembali lulusan SMU tapi dengan output sarjana," paparnya.

Dengan output sarjana ini pun, lanjut Irjen Boedi Santosa, didasari beberapa alasan. Pertama, mereka tak perlu lagi meneruskan S1-nya di PTIK -- dulu, kesempatan ini baru bisa diperoleh setelah mereka dinas dulu yang waktunya cukup panjang dan usianya pun mulai tua. Dengan pertimbangan itu maka dilakukan percepatan atau akselerasi, dengan memberlakukan program S1-nya cukup di Akpol saja. Kemudian, kedua, tuntutan perubahan KUHAP yang mensyaratkan seorang penyidik setidaknya sarjana bergelar S1.

"Ini kemudian kita usulkan kepada pokja yang menggarap KUHAP agar ada jeda waktu 10 tahun. Makanya dengan lulusan Akpol yang sudah meraih S1 diharapkan lahir inspektur polisi yang akademisi sekalian. Artinya praktisi akademisi. Lahir langsung punya gelar S1, sehingga dia bisa bertindak sebagai penyidik begitu lulus Akpol. Kalau dia hanya lahir sebagai inspektur saja, dia tidak punya legalitas sebagai



penyidik," ungkap Irjen Boedi Santosa.

Dengan adanya reasoning itulah, masih kata Gubernur Akpol, maka disusun kurikulum program pendidikan Akpol menuju S1 dengan tag line "45 Tahun Akpol Striving For



Excellence" yang dimulai pada 2010. "Nah, detasemen 45 yang melalui hasil rekrutmen bulan Agustus kemarin proses belajar-mengajarnya sudah menggunakan kurikulum ini," ujarnya.

Kurikulum itu sudah digarap Akpol dibantu outsourcing dari berbagai perguruan tinggi Undip, Unes, UGM, yang juga di sponsori oleh UII dan juga difasilitasi oleh Kusrom selaku pengampu ilmu hukum dari universitas Islam Yogya.

"Kita juga dibimbing oleh ahli kurikulum dari Depdiknas. Kurikulum dasar sudah kita susun. Kemudian terkait dengan legalitas sebagai lembaga pendidikan tinggi Akpol juga bermitra dengan PTIK yang sekarang berubah menjadi STIK. Di sana kurikulum pun disesuaikan. Kalau dulu PTIK mendidik lulusan Akpol selama empat semester untuk jadi sarjana S1, sekarang STIK mendidik lulusan sarjana. Dengan demikian program pendidikan Akpol yang disambung dengan program pendidikan yang sekarang ini maka lengkaplah dari hulu ke hilir sudah masuk kurikulum itu semua," papar Irjen Boedi Santosa.

Itu artinya, dengan adanya program yang dimulai pada 2010 berarti perwira Akpol yang sudah lahir di Akpol sebelum 2010 masih meneruskan di STIK dan akan selesai sampai 2016. Namun demikian, mereka boleh saja dan bisa meneruskan di luar STIK, yang penting dalam percepatan untuk mencukupi tuntutan KUHAP tadi.

Karena, di pendidikan Akpol ada materikulasi yang bisa dimaterikulasi di perguruan tinggi umum lainnya.

"Kurikulum program S1 ini akhirnya akan diketok dalam sidang pleno Wandiklat pada 9 Desember di Mabes Polri, di bawah pimpinan Wakapolri selaku ketua Wandiklat. Ini sudah dibicarakan di forum sarasehan, seminar, rakor dengan Sespim, PTIK dan lembaga pendidikan di lingkungan Polri lainnya di bawah pimpinan Kepala Lemdikpol yang baru. Kurikulum itu sudah final dan proses kurikulum itu kita format dalam bentuk durasi pendidikannya 10 semester, sesuai ketentuan UU atau Peraturan Menteri Pendidikan dimana satu semester ada 16 minggu.

Itu kan sama dengan 4 bulan efektif (bukan kalender). Nah kalau dihitung 10 semester itu dihitung-hitung kan 40 bulan atau kira-kira sama dengan 3 tahun 4 bulan. Jadi lamanya sama dengan program Akpol sebelumnya yang tak melahirkan S1. Berarti sudah ada percepatan waktu, efisiensi dan sekaligus meraih gelar sarjana. Harusnya kalau merekrut S1 keluarnya S2, tapi kita kan tidak punya program itu," papar Irjen Boedi Santosa.

Sementara itu, seperti digambarkan oleh Wakil Gubernur Akpol, Brigjen Pol Drs. Badrun Arifin, tahun ini ada tiga program yang lulus sekaligus, yaitu mereka yang mulai masuk tahun 2007, 2008 dan 2009. Mereka lulus sekaligus dengan program yang berbeda-beda, ada yang 3,4 tahun, 2,4 tahun dan 1,4 tahun.

"Ke depan, angkatan yang masuk Agustus lalu, kita hanya menerima sumber SMU/SLTA lagi, yang diproyeksikan jadi sarjana S1 pada 2013. Oleh karena itu, maka operasional pendidikan pun harus menyesuaikan. Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Ya, 10 komponen pendidikan harus kita sesuaikan, mulai dari dosennya, stafnya, sarana

dan prasarananya, metodenya, dan lain sebagainya," papar Badrun Arifin.

Besarnya tantangan dengan program ini, lanjut Badrun Arifin, memaksa seluruh staf harus mengubah mindset. Nah, Akpol ini adalah 'dapur' untuk mengubah mindset tersebut, terutama mindset calon-calon perwira, kader-kader pemimpin masa depan.

"Penanaman nilai-nilai seorang perwira disinilah dapurnya. Oleh karena itu perhatian Mabes Polri ke Akpol harus lebih maksimal. Misalnya begini, dalam sistem pembinaan karir perwira Polri mestinya yang ditugaskan di Akpol itu yang pilihan, yang memang memiliki komitmen dalam menjalankan misi Akpol. Ada mekanisme penugasan yang memang sesuai kemampuan. Dengan struktur baru ini Akpol menjadi satu rumpun dengan lembaga pendidikan Polri yang lain, seperti Sespim Polri, STIK dan pendidikan lainnya di bawah Lemdikpol," ungkapnya.

DIASUH, DAN DI-ESQ- KAN

Di sisi lain, Gubernur Akpol Irjen Boedi Santosa menekankan agar masyarakat jangan salah anggapan dengan kembalinya rekrutmen

Akpol dari lulusan SLTA/SMU. Perkembangan global sekarang, bagaimanapun, sudah sangat mempengaruhi pola berpikir anak SMA saat ini. "Anak-anak SMA sekarang sudah hebat-hebat intelektualnya, dan moralnya hebat juga. Dunia gemerlap dan daerah 'abu-abu' sudah tahu. Film porno 'bintang satu' sampai 'bintang lima' sudah kenal. Ini dunia yang tak bisa kita bendung. Tak bisa dilarang, karena mereka bisa akses langsung dari hp-nya. Penggunaan laptop juga begitu, disamping untuk mendukung proses belajar juga tak bisa dipungkiri juga untuk main-main. Tapi di sini pelanggaran apapun bisa kita deteksi. Kita memang tidak memiliki intercept untuk mendeteksi pelanggaran itu namun dengan mengutamakan sentuhan-sentuhan pengasuh. Saya kira dengan nasehat-nasehat dan bimbingan lebih bisa mengena," harapnya.

Untuk memperbaiki kualitas moral polisi, jelas Irjen Boedi Santosa, memang dimulai dari pendidikan dasar di Akpol. Disinilah





dari kita. Nggak bisa lagi kita samakan dengan jaman kita dan sekarang. Pola pendidikan dan pengasuhan kita harus betul-betul berubah. Itu yang saya kira harus menjadi pegangan para pendidik dan pengasuh kita di Akpol ini," ungkapnya.

Kombes Pol Bambang Usadi juga mengaku sangat salut dengan kebijakan pimpinan Akpol yang tidak hanya memikirkan masalah kecerdasan intelektual namun ada juga aspek kecerdasan emosional, spiritual yang dikembangkan. "Saya bersyukur ketika masuk ke sini sudah ada program ESQ masuk kurikulum. Nah ke depan akan menjadi semacam SKS sebagai materi pendidikan karakter. Orang boleh saja mencemooh hari ini berdzikir? Silakan, tapi saya sudah merasa sukses membuktikannya," ungkap Bambang Usadi.

Cukup pentingnya materi ESQ membentuk kecerdasan emosional dan spiritual anggota, dibuktikan Bambang Usadi dalam penanganan huru-hara seperti di Padalarang, Garut Selatan, saat dia menjabat Kasat Brimob di Polda Jabar. Kasus tersebut, jelasnya, bisa ditangani tanpa harus dengan menggunakan kekerasan. "Saya kira berkat sudah di-ESQ kan maka anggota tidak lagi memandangi pelaku huru-hara seperti musuh perang. Tapi melihatnya sebagai bagian dari masyarakat yang saat itu sedang membutuhkan jalan keluar atas permasalahannya. Mereka mengatasi huru-hara bukan

dengan setting mau perang" jelas Bambang Usadi.

Bahwa pola pendidikan dan pengasuhan Akpol kini benar-benar sudah meninggalkan pola paradigma lama diyakinkan pula oleh Kombes Pol Drs Edi Setjo, selaku Direktur Pembinaan Taruna dan Latihan (Dir Bintarlat) Akpol. Dibawah komandonya lah Bintarlat menjalankan fungsi dan tugasnya, yaitu menyelenggarakan, menyusun, merumuskan Program Pelatihan dan Pengasuhan Taruna Akpol dan Siswa.

Khusus dalam hal pengasuhan, kombes senior alumni Akpol '84 ini menegaskan bahwa pola pengasuhan di Akpol menerapkan azas-azas; saling asah, asih dan asuh dan – ini yang terpenting – suri tauladan. Katanya, Akpol sebagai lembaga pendidikan pencetak perwira polisi yang akan menjadi kader-kader pemimpin masa depan sudah selayaknya Akpol pun menjunjung tinggi HAM dalam pola pengasuhannya. Itu artinya, tanpa sedikitpun ada kekerasan, tapi lebih mengedepankan sentuhan-sentuhan layaknya orangtua ke anak.

"Intinya pola pendidikan dan pengasuhan kita memang harus betul-betul berubah. Itu saya kira yang harus menjadi pegangan para pendidik dan pengasuh seperti kita-kita ini," tegas Kombes Pol Drs Edi Setjo. [JT 02]



mereka dididik, ditempa dan diasuh dan dibekali dengan tiga aspek kemampuan, yaitu knowledge, attitude, serta skill. Nah, aspek attitude itulah yang dibangun melalui kerjasama dengan ESQ Leadership Center yang sudah memiliki jaringan di Korwil seluruh propinsi dan ada forum komunikasi alumni hingga di kabupaten. Akpol pun sudah melakukan in-house training ESQ yang diikuti seluruh taruna baik yang baru masuk maupun yang mau lulus perwira.

Bagi mereka yang baru masuk, yang ditanamkan adalah bagaimana membangun motivasi semangat belajar. Bahwa mereka berada di Akpol tugasnya adalah belajar untuk menjadi calon-calon pemimpin masa depan, memberi pengabdian kepada Negara dan masyarakat.

Sedangkan bagi yang mau lulus, materinya adalah memotivasi mereka agar mampu bekerjasama dengan masyarakat. "Kemarin waktu mereka mau cuti ke daerah asal masing-masing mereka kita wajibkan untuk bertemu dengan para alumni ESQ dari luar Polri. Tugas mereka adalah wajib mendatangi Korwil-Korwil itu dan melakukan komunikasi."

Hal ini diakui Dir Akademik Akpol, Kombes Pol Drs Bambang Usadi. "Kita melihatnya ke depan, bahwa perkembangan anak-anak kita sangatlah pesat. Anak kita jauh lebih cerdas dan cepat menguasai ilmu yang ada di depannya. Soal IT, komputer, selain mereka hebat juga lebih pintar